2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH DIY

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 562811 psw 1302
Website : http://biroperekonomian.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2023
Kepala Biro Administrasi Perekonomian
dan Sumber Daya Alam Setda DIY,

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA

YUNI PANCAWATI, S.E., M.Si.
NIP. 196606041993032007

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 "Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA":

   - Diukur dengan indikator persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1 (persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1).
   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Perekonomian dan Pembangunan.
   - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah memenuhi target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
   - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 105% memang terjadi penurunan sebesar 5%, namun secara target tahunan pada tahun ini telah memenuhi target yang ditetapkan.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1) Ketimpangan pembangunan antar wilayah
2) Daya saing daerah relatif masih rendah
3) Daya dukung lingkungan semakin menurun
4) Kontribusi sektor dominan belum maksimal

Sehingga perlu adanya kebijakan yang implementatif dan berdampak langsung kepada masyarakat sehingga keempat masalah besar di bidang perekonomian tersebut dapat terselesaikan pada tahun mendatang.

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada, maka disusun suatu arah kebijakan yang terfokus pada Pengembangan Pusat Pertumbuhan, Pengembangan sektor Dominan di DIY, dan Tata Kelola Lingkungan Hidup. Sebagai kerangka implementasi arah kebijakan yang telah ditentukan tersebut, maka Pemda DIY akan mendukung kegiatan-kegiatan yang memajukan wilayah pinggiran dan terpencil serta melaksanakan program besar yang memberikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR....2
IKHTISAR EKSEKUTIF....3
DAFTAR ISI....5
DAFTAR TABEL....6
DAFTAR GAMBAR....7
BAB I PENDAHULUAN....8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah....8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY....10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan....11
1.4 Isu-isu Strategis....12
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran....13
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021....16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA....17
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD....17
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan....18
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2022....19
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022....22
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja....26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA....27
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022....27
3.2. Efisiensi Anggaran....49
3.3. Inovasi....50
3.4. Lintas Sektor....52
BAB IV PENUTUP....72
LAMPIRAN-LAMPIRAN....74

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi..... 13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana..... 14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan 2022..... 15
Tabel II.1 Sasaran Strategis Biro Administrasi perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah DIY, 2017-2022..... 18
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan..... 18
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022..... 19
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022 20
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Tahun 2022..... 22
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 27
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022..... 27
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan..... 28
Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 28
Tabel III.4 Perbandingan Target dan Capaian..... 29
Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja..... 33
Tabel III.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022..... 49
Tabel III.7 Inventarisasi Lintas Sektor..... 54

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja..... 9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY 10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY..... 11
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK,Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP.....26
Gambar III.1. Penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Jawa-Bali.....34
Gambar III.2. Penghargaan Finalis Wilayah Implementasi KEJAR Terbaik Tingkat Provinsi.....36
Gambar III.3. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022 39
Gambar III.4. Pemantauan Produksi Garam di Kugar Tirta Bahari..... 47
Gambar III.5.Pemantauan Pembangunan Rumah Produksi Garam di Kugar Tirta Bahari..... 47
Gambar III.6. Sertifikat SNI untuk Garam Konsumsi dari Tirta Bahari..... 48

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2021*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja

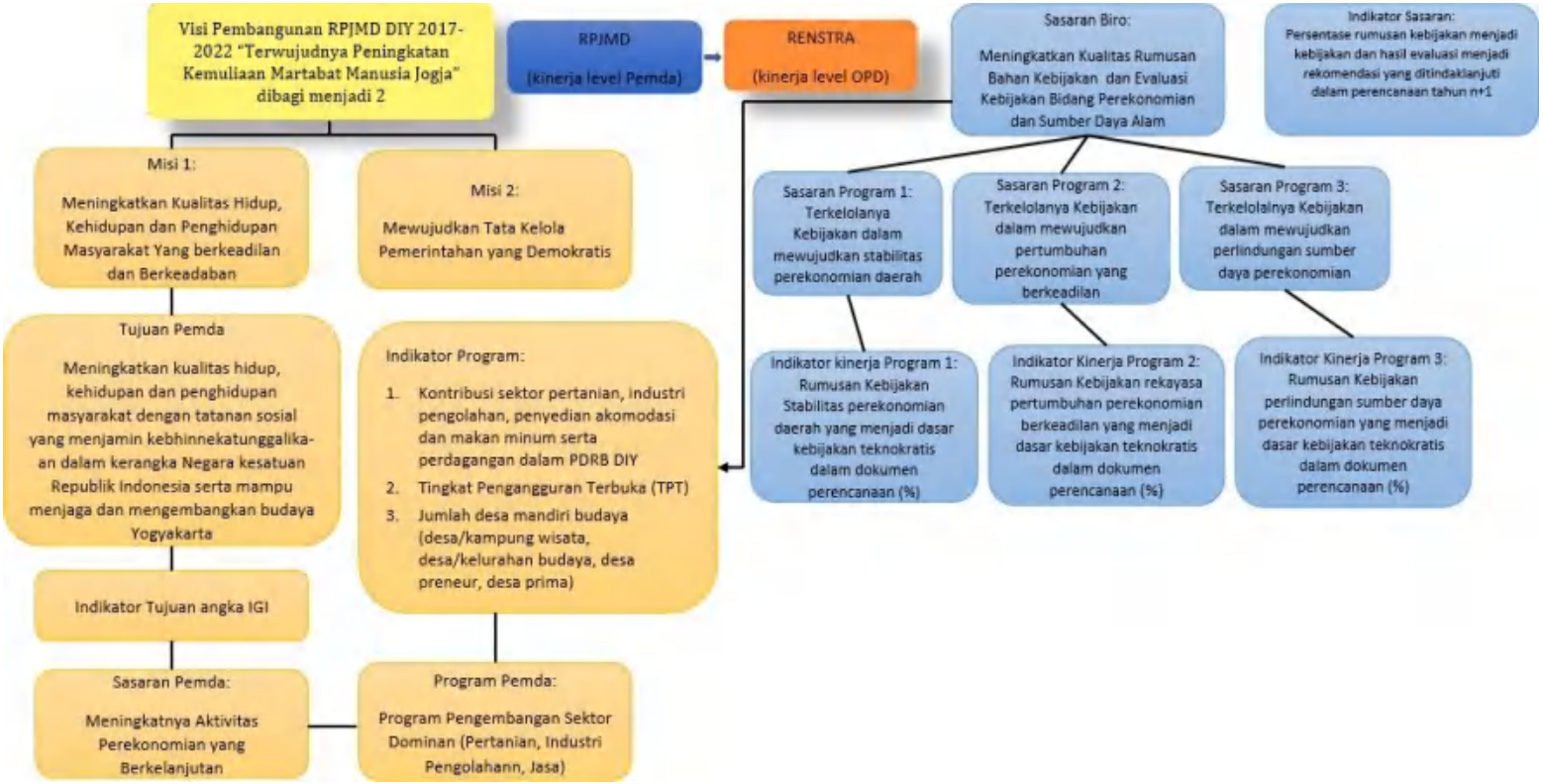

Sumber: Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan SDA 2017-2022

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY

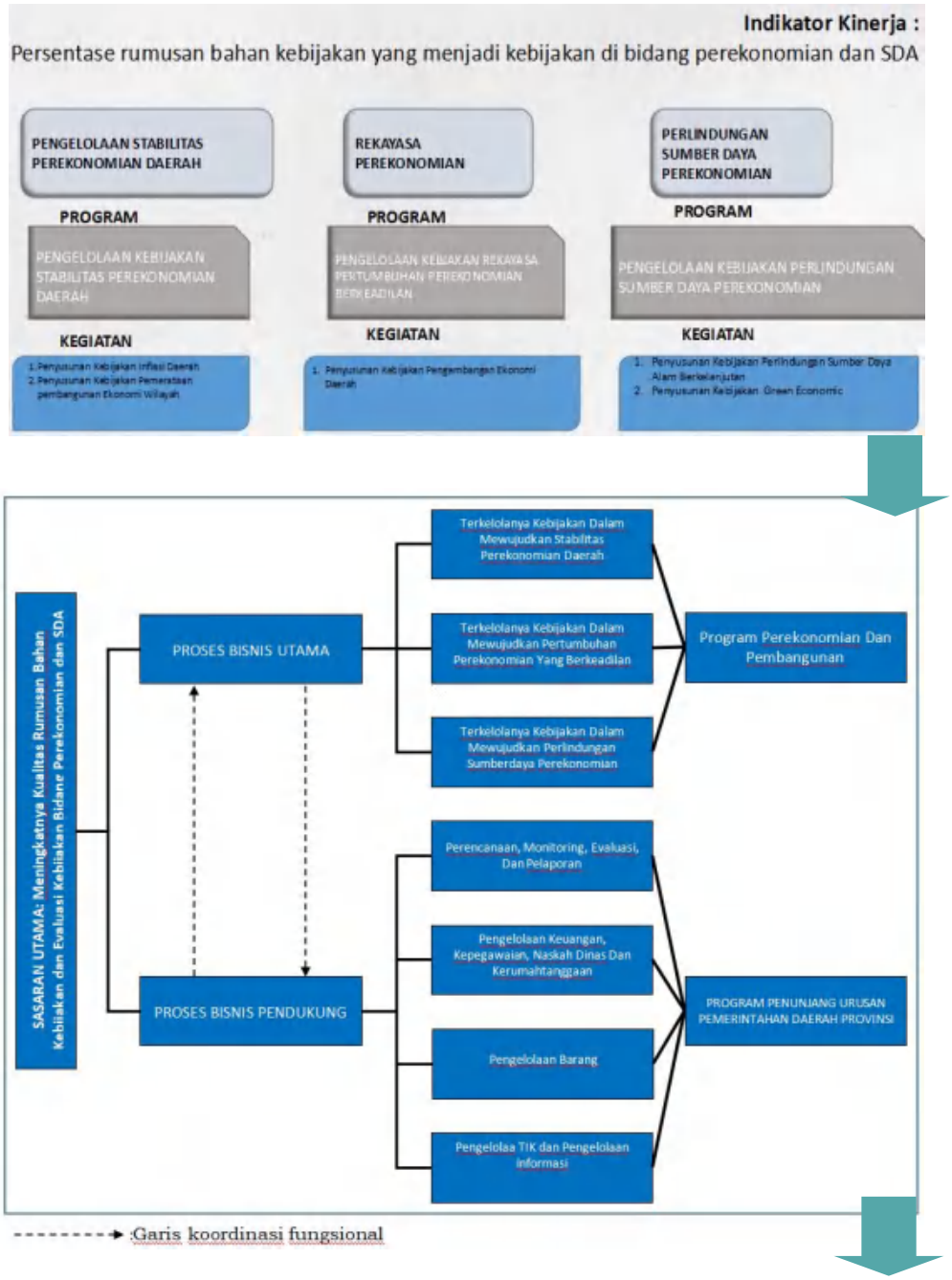

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Biro Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 136 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Adapun fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaaan sumber daya perekonomian;
3. Koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaaan sumber daya perekonomian;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaaan sumber daya perekonomian;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
6. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 136 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah dapat dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana/fungsional berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 136 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Biro 2. Kabag Rekayasa Perekonomian: 1) Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah 2) Kasubbag Tata Usaha 3. Koordinator Substansi Pengelolaan Stabilitas Perekonomian Daerah: 1) Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian Inflasi Daerah 2) Subkoordinator Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah 4. Koordinator Substansi Pengelolaan Sumber Daya Perekonomian: 1) Subkoordinator Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Ekonomi Hijau 2) Subkoordinator Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam	1. Dibawah Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian Inflasi Daerah : 1) Analis Perekonomian 2. Dibawah Subkoordinator Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah: 1) Analis Pembangunan 3. Dibawah Subkoordinator Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Ekonomi Hijau 1) Analis Program/ Kegiatan Pembangunan Pertanian 2) Pengadministrasi Umum 4. Dibawah Subkoordinator Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam 1) Analisis Kelautan dan Perikanan 5. Dibawah 1)Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah 1) Analis Pengembangan Potensi Daerah 2) Pengadministrasi Umum 6. Di bawah Kasubbag Tata Usaha: 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 2)Pengelola Akuntansi; 3) Pengadministrasi Kepegawaian; 4)Pengelola Gaji; 5)Pengadministrasi Keuangan; 6)Pengelola Barang Milik Negara; 7)Pranata Kearsipan; 8)Verifikator Data Laporan Keuangan; 9)Pengadministrasi Persuratan; 10)Bendahara; 11) Pengemudi

1.4 Isu-Isu Strategis

Isu strategis pembangunan bidang perekonomian menjadi bagian penting di dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis dalam hal ini dibangun pada beberapa sektor pembangunan, meliputi sektor industri dan perdagangan, akses keuangan daerah, koperasi dan UMKM, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan, serta kelautan dan perikanan.

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi. Oleh karena itu, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melakukan analisis terhadap isu-isu strategis agar dapat menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera.

Program prioritas yang menjadi pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Perekonomian dan SDA adalah Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah, Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian berkeadilan, dan Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian. Program prioritas tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda DIY ataupun bersama instansi terkait lainnya maupun dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menghasilkan bahan rumusan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				L	P
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
1	2	3	4				5	6				7	9
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1					1
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	3	3				1	1				1	
	2. Pengawas	6		6			1	1					1
	3. Pelaksana	32		19	12	1	21	6	8	2	5	9	12
C.	Jabatan Fungsional	3					7	5	2			5	2
	Jumlah	45					31	14	10	2	5	15	16

Sumber: Data Kepegawaian Biro Desember 2022

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 14 orang (45,16%) , disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang (32,26%), SLTA sebanyak 5 orang (16,13%), D3 sebanyak 2 orang (6,45%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, sedangkan untuk jabatan struktural merata antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 14 orang pelaksana. Namun adanya pegawai tenaga bantu sejumlah 6 orang cukup membantu pelaksanaan pekerjaan. Jika dilihat dari aspek kualifikasi pendidikan, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA mempunyai SDM dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi daripada yang dipersyaratkan dalam Peraturan Gubernur DIY nomor 104 tahun 2018 tentang kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai. Dari aspek kualifikasi pendidikan terdapat 7 pegawai yang mempunyai kualifikasi pendidikan lebih tinggi dari yang dipersyaratkan. Namun masih terdapat 5 pegawai yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan akan tetapi karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Alat-alat Angkutan	8 unit	848.525.314
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	219 unit	890.412.3499
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	7 unit	27.910.000
	Aset Tetap Lainnya		
1	Buku Perpustakaan	409 buku	23.439.000
	Jumlah		1.828.490.713

Sumber: Buku inventaris tahun 2022
**Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2022*

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 3 (tiga) unit kendaraan operasional, dan 2 (dua) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun

perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2022

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5			**BELANJA DAERAH**			
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**4.089.826.550**	**2.830.446.750**	**(1.259.379.800)**
5	1	01	Belanja Pegawai	42.360.000	42.360.000	0
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.047.466.550	2.788.086.750	(1.259.379.800)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**-**	**-**	**-**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
			Jumlah Belanja	**Rp. 4.089.826.550**	**Rp. 2.830.446.750**	**Rp. (1.259.379.800)**

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Tahun 2022

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2022 Anggaran Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam semula Rp. **4.089.826.550** dan mengalami perubahan menjadi Rp. **2.830.446.750** atau berkurang Rp. **1.259.379.800** Perubahan anggaran Tahun 2022 merupakan cerminan dukungan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang

kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Surat Inspektur DIY Nomor : 700/0103 tanggal 15 Maret 2022, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah DIY. Rekomendasi: a. Melakukan evaluasi atas program dan kegiatan OPD terkait output dan outcome yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan b. Terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga seluruh target baik output maupun outcome yang ditetapkan dapat tercapai dan bisa mendapatkan penilaian yang baik atas kinerja dari stakeholder	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan di tingkat internal Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY atas program dan kegiatan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, termasuk dalam hal evaluasi kinerja secara menyeluruh, diharapkan ke depan hasil atas implementasi SAKIP di biro dapat lebih meningkat.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2022*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya aktivitas perekonomian berkelanjutan yang didukung oleh Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa). Terkait hal

tersebut tujuan jangka menengah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY selama lima tahun adalah :

"Menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera"

Adapun sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	%	54,71	80	85	90	95	100	100

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Peningkatan kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA melalui ekonomi inklusif yang berkelanjutan	Merumuskan arah kebijakan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam hayati berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY tahun 2022 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan valuasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.1. Program Perekonomian dan Pembangunan	**3.702.784.550**	**2.279.746.000**	**(1.423.038.550)**
	1.1.1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1.411.052.000	1.411.052.000	0
	1.1.1.1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1.032.537.000	1.032.537.000	0
	1.1.1.2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	378.515.000	378.515.000	0
	1.1.2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	2.119.718.550	696.680.000	(1.423.038.550)
	1.1.2.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2.119.718.550	696.680.000	(1.423.038.550)
	1.1.3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	172.014.000	172.014.000	0
	1.1.3.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka	172.014.000	172.014.000	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Usaha			
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		**3.702.784.550**	**2.279.746.000**	**(1.423.038.550)**

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**387.042.000**	**387.042.000**	**0**
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**34.062.000**	**34.062.000**	0
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.376.000	28.376.000	0
	1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.996.000	1.996.000	
	1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.690.000	3.690.000	0
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**38.135.000**	**38.135.000**	**0**
	2.1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.760.000	32.760.000	0
	2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.218.000	2.218.000	0
	2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.157.000	3.157.000	0
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**9.600.000**	**9.600.000**	**0**
	3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000	9.600.000	0
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**191.245.000**	**191.245.000**	**0**
	4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.350.000	2.350.000	0
	4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.674.000	20.674.000	0
	4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.603.000	6.930.000	0
	4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.160.000	22.160.000	0

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.520.000	8.740.000	0
	4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.938.000	67.296.000	0
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**6.770.000**	**6.770.000**	**0**
	5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.170.000	3.170.000	0
	5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000	3.600.000	0
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**107.230.000**	**107.230.000**	**0**
	6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.430.000	23.430.000	0
	6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.445.000	64.445.000	0
	6.3. Pemeliharaan Mebel	1.645.000	1.645.000	0
	6.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.830.000	12.830.000	0
	6.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.880.000	4.880.000	0
				0
	Total Anggaran Pendukung	**387.042.000**	**387.042.000**	**0**

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Tahun 2022

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan valuasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	%	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan	Program Perekonomian dan Pembangunan (APBD)	Rp. 3.702.784.550
2.	Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian		
3.	Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah		
4.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 387.042.000
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp. 4.089.826.550

2. *) Data capaian tersedia pada triwulan IV

Pada tahun 2022, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penangangan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022. Perjanjian Kinerja (Reviu) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan valuasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	%	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhiranya	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan	Program Perekonomian dan Pembangunan (APBD)	Rp. 2.279.746.000
2.	Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian		
3.	Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah		
4.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 387.042.000
5.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp. 2.666.788.000

2. *) Data capaian tersedia pada triwulan IV

Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya Rp. 163.658.750

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP

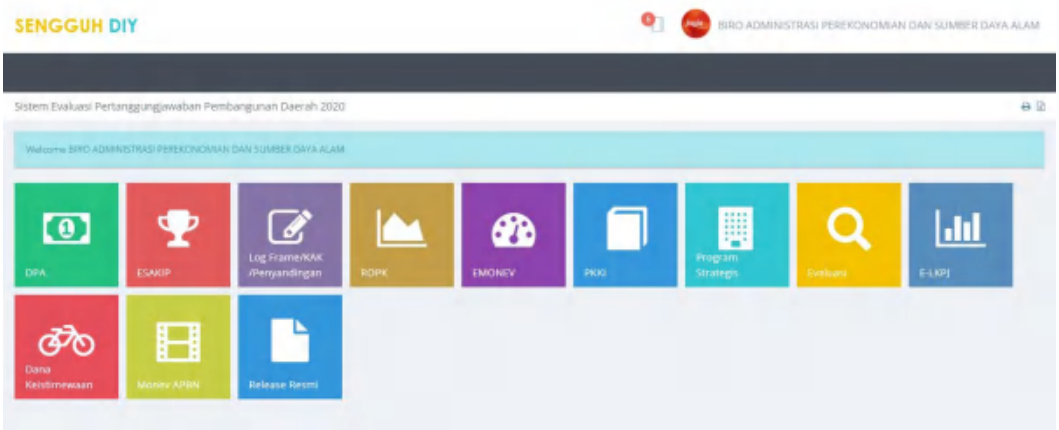

Sumber:http://sengguh.jogjaprov.go.id/

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2022*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Biro Administrasi perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Biro Administrasi perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya	Indikator: persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam	%	54,71	105	100	100	100	Sangat Baik	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Alam	perencanaan tahun n+1 Meta Indikator: persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1								

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam diukur dengan persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1

Sumber data perhitungan rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1 pada tahun 2022 ditetapkan 5 (lima) dokumen yaitu :

1. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah,
2. Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah,

3. Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi daerah,
4. Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan
5. Rekomendasi *green economic*

Tabel III.4 Perbandingan Target dan Capaian

No	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2022	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
1	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah,	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah,	a. Peraturan Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah DIY Tahun 2022-2024. Peta Jalan (Road Map) ini merupakan pedoman bagi baik Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian inflasi DIY selama tiga (3) tahun. b. Surat Edaran Nomor 510/6629 Tentang Pengendalian Pengguna LPG 3 KG. c. Surat Edaran Nomor 500/16964 Tentang Pengendalian Inflasi Daerah d. Nota Dinas Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2022 Pemerintah Daerah DIY e. Kesepakatan Bersama Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta dengan Biro Perekonomian Tentang Pengelolaan Pangan yang Terintegrasi di Wilayah DIY
2	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah,	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah,	a. Pergub DIY Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY. b. Nota Dinas Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Literasi Keuangan dan Kewirausahaan yang dilaksanakan serentak di 12 SMA/SMK se-DIY. c. Laporan Pelaksanaan Program Kerja TPAKD DIY Tahun 2021
4	Rekomendasi kebijakan pengembangan	Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi daerah,	a. Nota Dinas Koordinasi Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

No	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2022	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
	ekonomi daerah,		Daerah (RIPPARDA) DIY b. Surat Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 30/SEKDA/VI/2022 tentang Penetapan Kriteria Penilaian Sebagai Dasar Pemberian Peringkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya c. Keputusan Gubernur DIY Nomor: 234/KEP/2022, Tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022 d. Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor: 44/SEKDA/VIII/2022, Tentang Instrumen Monitoring dan Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya e. Nota Dinas Usulan Calon Desa/Kalurahan untuk Ditetapkan Sebagai Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022 f. Penerbitan Instruksi Gubernur Nomor 27/INSTR/ 2022 Tentang Kolaborasi dan Sinergi Pentahelix dalam Optimalisasi Pengembangan Potensi Lokal Sebagai Upaya Percepatan Pemuliahan Ekonomi Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta g. Bahan Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Dampak Pasca Pandemi Covid-19 Terhadap Roadmap baru Pemberdayaan UKM di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif h. Rekomendasi Kebijakan Sebagai Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2022 i. Nota Dinas tentang Arah Kebijakan Perekonomian Tahun 2024

No	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2022	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
5	Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan	Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan	a. Pergub DIY Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau b. Nota Dinas Laporan Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam DIY c. Sertifikasi SNI Garam Konsumsi, sebagai capaian roadmap usaha garam tahun 2020-2022
6	Rekomendasi green economic	Rekomendasi green economic	a. Nota Dinas Penyampaian Hasil Kajian Penyusunan PDRB Hijau Tahun 2022 di Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di DIY
7		Dokumen Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama terkait pengembangan ekonomi daerah:	a. Nota Dinas Laporan Rapat Koordinasi Dukungan Logistik Terintegrasi di DIY b. Nota Dinas Laporan Pelaksanaan Webinar Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Optimalisasi Peran TPAKD yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI c. Nota Dinas Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kredit Usaha Rakyat DIY Tahun 2022 d. Nota Dinas Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Komisi Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) DIY e. Nota Dinas Kegiatan Diskusi Terbatas Sosialisasi Pembentukan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah f. Telaah Staff Kajian Potensi Pendapatan Daerah dari Sektor Bisnis Online /Komunikasi g. Telaah Staff Kajian Perekonomian

No	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2022	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
			Rumah Tangga di Kawasan Perkotaan h. Nota Dinas Tindak Lanjut Hasil Penguatan Forum Asda Ekbang Provinsi Se-Indonesia dan Rancangan Usulan Kerjasama Pemda DIY dengan Pemda Provinsi Jawa Barat i. Nota Dinas Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Gubernur terkait Penguatan DMB dan Hasil Sharing Session Leadership j. Nota Dinas Koordinasi Pembahasan Pengaktifan Kembali Kerjasama Sister Province antara DIY dengan Chiang Mai, Thailand serta DIY dengan California, Amerika k. Nota Dinas Telaah atas Permohonan East Ventures untuk Diskusi Khusus dengan Gubernur DIY tentang Ekonomi Digital Provinsi l. Nota Dinas Hasil Koordinasi terkait Pengembangan Konsep Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur m. Nota Dinas Rekomendasi Kebijakan Sebagai Tindak Lanjut dari Hasil Seminar Nasional tentang Kerjasama Antar Daerah dalam Meningkatkan Daya Saing dan Pemberdayaan UMKM n. Bahan Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Dampak Pasca Pandemi Covid-19 Terhadap Roadmap baru Pemberdayaan UKM di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif o. Rekomendasi Kebijakan Terkait Hasil Kajian Review Kebijakan Strategis Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan DIY Tahun 2019-2025 p. Rekomendasi Kebijakan dan Usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

No	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2022	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
			q. Penetapan Kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2023 DIY

Capaian kinerja fasilitasi perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2022 dengan indikator Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1 terealisasi sebesar 100% dari target 100% atau dengan persentase capaian sebesar 100%.

Kinerja sasaran terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	105	100	100 (5/5*100)	100 (100/100*100)	100	100

Analisis Ketercapaian Sasaran: Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 100%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (terpenuhi).
b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 105%, terdapat penurunan sebesar 5%.

c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Prosentase peningkatan capaian tersebut didukung dari :

a. Capaian Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY berupaya untuk menjaga stabilitas harga terutama bahan pangan pokok strategis yang banyak dikonsumsi masyarakat. Dengan demikian, TPID DIY melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok serta menyusun kebijakan pengendalian harga yang berpengaruh pada perkembangan inflasi. Selain itu, TPID DIY juga melakukan kegiatan koordinasi dan pemantauan untuk mendapatkan informasi terkait. Pada tahun 2022 TPID DIY telah menyusun program unggulan yang sejalan dengan *roadmap* pengendalian inflasi untuk jangka waktu 2012-2024. Secara umum pengendalian inflasi yang dilakukan TPID DIY tetap mengacu pada prinsip 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif)

Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY selaku sekretariat TPID selalu berupaya berinovasi dalam kegiatan pengendalian inflasi daerah. Hal ini terbukti dengan dicapainya penghargaan berupa Nominasi TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Jawa-Bali yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tahun 2022.

Gambar 3.1 Penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Jawa-Bali

Sumber: Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

Selain menjaga stabilisasi harga, TPID DIY saat ini juga menitikberatkan pada menjaga kestabilan produksi dan pasokan komoditi pangan sehingga menginisiasi tersusunnya Peraturan Gubernur DIY nomor 71 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal. Dengan adanya Peraturan Gubernur ini, diharapkan antara lain:

a. Menjaga kestabilan produksi dan pasokan komoditi pangan
b. Meningkatkan produktifitas dan kestabilan harga komoditi pangan
c. Memudahkan pengawasan distribusi pangan dari produsen sampai ke konsumen
d. Adanya ketersediaan Sistem Informasi Tata Niaga Pangan yang akurat berkaitan dengan produktifitas, pola distribusi, jumlah pasokan dan harga di DIY sebagai instrumen system peringatan dini dalam pengendalian inflasi.

Dalam menjaga ketahanan ekonomi lokal sebagai upaya pengendalian inflasi di DIY diperlukan adanya pengawasan iklim persaingan usaha yang sehat secara lebih intensif sebagai langkah optimalisasi pengelolaan potensi dan sumber daya daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemda DIY menginisiasi adanya kerja sama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk bersama-sama menciptakan iklim persaingan usaha melalui pengawasan secara terintegrasi.

Optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) DIY dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah melalui sinergi program kerja yang lebih luas melibatkan lintas Perangkat Daerah dan lintas sektor di luar dan dalam lingkup Pemerintah Daerah DIY. Beberapa program kerja TPAKD Tahun 2022 antara lain 1) Program Unggulan *Business Matching* Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Digital di Pesisir Pantai Selatan Gunungkidul yaitu frekuensi kegiatan temu kemitraan, pemanfaatan QRIS, dan penyaluran KUR, 2) Program Tematik Pembiayaan Melawan Rentenir melalui Kredit Pembangunan Ekonomi Daerah (Kredit PEDE) yaitu realisasi penyaluran kredit PEDE, 3) Program Tematik Pemeliharaan *Website* KURjogja yaitu kegiatan pemeliharaan, evaluasi, dan sosialisasi website, 4) Program Tematik Pengembangan Kampung Digital Pantai Glagah yaitu pembukaan dan pemanfaatan QRIS, 5) Program Lingkup Sekolah Berbudaya Menabung & Wirausaha (Lilah Dana & Usaha) di Sekolah pada Wilayah Kesejahteraan Rendah yaitu sosialisasi produk/layanan keuangan dan upaya perlindungan

konsume, dan 6) Target Penumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan yaitu kegiatan pendampingan, sosialisasi, dan temu kemitraan.

Gambar 3.2 Penghargaan Finalis Wilayah Implementasi KEJAR Terbaik Tingkat Provinsi

Sumber: Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

Peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM juga dioptimalkan melalui pelaksanaan program KUR yang ditindaklanjuti dengan penyusunan website KUR Jogja (kurjogja.id) untuk mempercepat proses pengajuan KUR dan meningkatkan digitalisasi akses keuangan oleh TPAKD DIY yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah DIY pada akhir Tahun 2022.

Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang dihasilkan antara lain:

1. Pergub DIY Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah DIY Tahun 2022-2024
2. Pergub DIY Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY
3. Surat Edaran Nomor 500/16964 Tentang Pengendalian Inflasi Daerah
4. Nota Dinas Laporan Pelaksanaan Program Kerja TPAKD DIY Tahun 2021.
5. Nota Dinas Laporan Rapat Koordinasi Dukungan Logistik Terintegrasi di DIY
6. Nota Dinas Laporan Rapat Koordinasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG dan BBM
7. Nota Dinas Hasil Rapat Koordinasi Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) DIY
8. Surat Edaran Nomor 510/6629 Tentang Pengendalian Pengguna LPG 3 KG
9. Nota Dinas Koordinasi TPID DIY dan Persiapan Menghadapi Idul Adha

10. Nota Dinas Laporan Penggunaan Produk Dalam Negeri Semester I Pemerintah Daerah DIY
11. Nota Dinas Laporan Hasil Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi
12. Nota Dinas Laporan Penggunaan Produk Dalam Negeri Semester I Pemerintah Daerah DIY
13. Nota Dinas Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Literasi Keuangan dan Kewirausahaan yang dilaksanakan serentak di 12 SMA/SMK se-DIY
14. Nota Dinas Laporan Pelaksanaan Webinar Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Optimalisasi Peran TPAKD yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI
15. Nota Dinas Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kredit Usaha Rakyat DIY Tahun 2022
16. Nota Dinas Laporan Penyelenggaraan KUR DIY Semester I Tahun 2022
17. Nota Dinas, Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Komisi Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) DIY
18. Nota Dinas, Hasill Kajian Grand Design dan Roadmap Pembentukan Pusat Grosir Pangan
19. Nota Dinas, Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2022 Pemerintah Daerah DIY
20. Nota Dinas, Kegiatan Diskusi Terbatas Sosialisasi Pembentukan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah
21. Telaah Staff Kajian Perekonomian Rumah Tangga di Kawasan Perkotaan
22. Kesepakatan Bersama Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta dengan Biro Perekonomian Tentang Pengelolaan Pangan yang Terintegrasi di Wilayah DIY

b. Capaian Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)

Menindaklanjuti program Pemerintah Daerah DIY, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY menginisiasi terbitnya Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. pembentukan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
b. pengelolaan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
c. monitoring dan evaluasi Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya

Program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan program yang telah dicanangkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY. Hal tersebut tertuang pada Program Pembangunan Daerah dengan berdasar pada arah kebijakan dan program strategis, dimana Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan prioritas pembangunan DIY dengan target pada capaian kinerja program terdapat 5 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya pada tahun 2019 dan sampai tahun 2022 ditargetkan tercapai sebanyak 20 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah DIY melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020 telah menetapkan 10 Desa/kalurahan sebagai Desa/kalurahan Mandiri Budaya dan pada tahun 2021 telah ditetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 383/KEP/2021 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya 2021. Selain itu di tahun 2021 juga dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Desa Mandiri Budaya.

Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah DIY berhasil menetapkan 7 (tujuh) Desa/ Kalurahan sebagai Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya yang telah dimuat dalam Keputusan Gubernur Nomor 234/KEP/2022 tentang Penetapan Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022. Sehingga total Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya yang telah ditetapkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Desa/Kalurahan. Untuk mewujudkan sistem penetapan Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya yang mengutamakan akuntabilitas dan kredibilitas, maka pada tahun 2022 Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri yang terbentuk melalui Keputusan Gubernur Nomor 28/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun Anggaran 2022 akan menyusun kriteria dan mekanisme penilaian sebagai dasar pemberian peringkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Melalui sistem ini Desa/Kalurahan diwakili perangkat desa dapat melakukan penilaian secara mandiri/self assesment yang kemudian akan dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim.

Berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, pada tahun 2022 pelaksanaan pemantauan evaluasi dilaksanakan melalui 4 (empat) metode, yaitu penilaian terhadap paparan perangakat Desa/Kalurahan terkait penyelenggaraan kebijakan, metode dokumentasi, metode survey, serta

metode wawancara dengan instrumen serta merode diskusi dengan perangkat Desa/Kalurahan. Rekomendasi kebijakan penyelenggaraan Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim. Selain itu, hasil evaluasi juga akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan kelanjutan program Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya di masing-masing Desa/Kalurahan.

Gambar 3.3 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022 di Kalurahan Pagerharjo

Dalam upaya mempercepat pencapaian Visi DIY 2025, maka perlu dilakukan pembangunan infrastruktur, pengembangan Kawasan strategis (keistimewaan atau yang diprioritaskan) yang menyeluruh dan terintegrasi dengan baik, serta pembangunan program strategis lainnya yang berdampak langsung dalam pertumbuhan ekonomi, menunjang tumbuh dan berkembangnya budaya yang baik dari masyarakat, serta mendukung ke arah sistem pendidikan yang tinggi. Pemerintah Daerah DIY berupaya melakukan langkah-langkah startegis dalam rangkamemenuhi kebutuhan infrastruktur yang sangat besar, dengan mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah DIY telah menetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 353/KEP/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang

Program Prioritas Pembangunan yang meliputi 17 (tujuh belas) Program Prioritas untuk dipercepat pelaksanaannya, yang terbagi dalam 3 kelompok yaitu Kelompok Pembangunan Infrastruktur, Kelompok Penataan/ Pengembangan Kawasan dan Kelompok Pembangunan Program Strategis Lainnya.

Selanjutnya dalam perwujudan percepatan pembangunan, diperlukan adanya koordinasi yang efektif antara pemangku kepentingan untuk menjamin akurasi penyelenggaeaan percepatan pembangunan program yang diprioritaskan. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY menginisiasi terbitnya Keputusan Gubernur DIY Nomor 237/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022 dan Keputusan Guberbur DIY Nomor 330/KEP/2021 tentang Pembentukan Project Management Unit Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022 yang dalam perkembangannya dilakukan perubahan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 11/KEP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 330/KEP/2021 tentang Pembentukan Project Management Unit Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022.

Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang dihasilkan antara lain:

1. Penerbitan Instruksi Gubernur Nomor 27/INSTR/ 2022 Tentang Kolaborasi dan Sinergi Pentahelix dalam Optimalisasi Pengembangan Potensi Lokal Sebagai Upaya Percepatan Pemuliahan Ekonomi Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Keputusan Gubernur DIY Nomor: 234/KEP/2022, Tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022
3. Surat Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 30/SEKDA/VI/2022 tentang Penetapan Kriteria Penilaian Sebagai Dasar Pemberian Peringkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
4. Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor: 44/SEKDA/VIII/2022, Tentang Instrumen Monitoring dan Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
5. Nota Dinas Rancangan Keputusan Sekretaris Daerah DIY tentang Penetapan Kriteria Penilaian Sebagai Dasar Pemberian Peringkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya

6. Nota Dinas Koordinasi Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) DIY
7. Bahan Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Dampak Pasca Pandemi Covid-19 Terhadap Roadmap baru Pemberdayaan UKM di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Rekomendasi Kebijakan Sebagai Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2022
9. Nota Dinas tentang Arah Kebijakan Perekonomian Tahun 2024
10. Nota Dinas Tindak Lanjut Hasil Penguatan Forum Asda Ekbang Provinsi Se-Indonesia dan Rancangan Usulan Kerjasama Pemda DIY dengan Pemda Provinsi Jawa Barat
11. Nota Dinas Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Gubernur terkait Penguatan DMB dan Hasil Sharing Session Leadership
12. Nota Dinas Koordinasi Pembahasan Pengaktifan Kembali Kerjasama Sister Province antara DIY dengan Chiang Mai, Thailand serta DIY dengan California, Amerika
13. Nota Dinas Telaah atas Permohonan East Ventures untuk Diskusi Khusus dengan Gubernur DIY tentang Ekonomi Digital Provinsi
14. Nota Dinas Hasil Koordinasi terkait Pengembangan Konsep Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur
15. Nota Dinas Rekomendasi Kebijakan Sebagai Tindak Lanjut dari Hasil Seminar Nasional tentang Kerjasama Antar Daerah dalam Meningkatkan Daya Saing dan Pemberdayaan UMKM
16. Bahan Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Dampak Pasca Pandemi Covid-19 Terhadap Roadmap baru Pemberdayaan UKM di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17. Rekomendasi Kebijakan Terkait Hasil Kajian Review Kebijakan Strategis Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan DIY Tahun 2019-2025
18. Rekomendasi Kebijakan dan Usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

c. Capaian Rumusan kebijakan perlindungan sumber daya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)

Pendekatan ekonomi yang berkelanjutan dapat mendorong laju perekonomian Indonesia sekaligus menjadi salah satu solusi untuk mengatasi berbagai dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Ekonomi yang berkelanjutan sendiri merupakan suatu gagasan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus berkeinginan untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya yang terbatas.

Sejalan dengan visi DIY yang ingin menjadikan pesisir selatan sebagai halaman depan, maka pengembangan wilayah tersebut menjadi suatu program prioritas sehingga terjadi keseimbangan tingkat perekonomian yang selama ini cenderung berkiblat pada sisi utara (wilayah non-pesisir). Meskipun demikian, prinsip pembangunan dan ekonomi yang berkelanjutan tetap menjadi pokok pemikiran utama.

Beberapa kegiatan yang diharapkan dapat mendukung tujuan besar diatas antara lain adalah :

a. Kajian Penyusunan PDRB Hijau di DIY
b. Kajian Desa Mandiri Hijau
c. Kajian Neraca Sumber Daya Alam DIY
d. Kajian Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Pendukung Ekonomi Hijau

Disamping ketugasan sesuai tugas dan fungsi yang melekat, terdapat pula ketugasan sebagai berikut :

a) Sebagai koordinator pengelolaan usaha garam di pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta.
b) Sebagai koordinator penetapan usulan kuota Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan se Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
c) Sebagai koordinator penetapan usulan kuota LPG 3 Kg se Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk mencapai target kinerja sesuai ketugasan serta mewujudkan perlindungan terhadap sumber daya perekonomian di DIY, disusun beberapa rumusan kebijakan perlindungan sumber daya perekonomian yaitu :

1. Nota Dinas Penyampaian Hasil Kajian Penyusunan PDRB Hijau Tahun 2022 di Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sebagai Bahan

Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di DIY, Nomor 520/01632 Tanggal 17 Mei 2022

2. Nota Dinas Penyampaian Hasil Kajian Desa Mandiri Hijau Tahun 2022 di Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di DIY Nomor 520/01633 Tanggal 17 Mei 2022

3. Nota Dinas Laporan Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam DIY, Nomor 031/3222

4. Nota Dinas Laporan Kajian Penyusunan Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Pendukung Ekonomi Hijau 520/3238 tanggal 28 Oktober 2022

5. Pergub DIY Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

6. Nota Dinas Penetapan Kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2023 DIY, Nomor 541/4268 tanggal 30 Oktober 2022

7. Sertifikasi SNI Garam Konsumsi, sebagai capaian roadmap usaha garam tahun 2020-2022

Pengelolaan lingkungan hidup sangat dibutuhkan guna deteksi dini dan cegah dini terkait adanya penurunan kualitas akibat pencemaran ataupun perusakan lingkungan hidup di D.I. Yogyakarta. PDRB Hijau (PDRB LH) untuk selanjutnya berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang berdampak relatif luas. Isu terkait pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ditengarai disebabkan oleh beberapa perusahaan di beberapa kawasan industri, usaha lainnya, pertanian dan aktivitas domestik rumah tangga di D.I. Yogyakarta.

Mengingat pentingnya PDRB Hijau sebagai upaya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, maka disusunlah kajian PDRB Hijau dengan maksud untuk memberikan masukan bagi para pengambil kebjakan dalam menentukan arah pembangunan DIY secara bijaksana sehingga pembangunan berjalan berkelanjutan menuju kesejahteraan sosial yang optimal.

Dengan adanya Kajian PDRB Hijau diharapkan adanya pendekatan dari sisi kepatuhan dan daya tanggap dalam implementasi suatu kebijakan atau aturan terkait PDRB Hijau di DIY dengan regulasi teknis yang sudah ada saat ini.

Hal tersebut untuk mendukung implementasi ekonomi hijau atau PDRB hijau secara lebih khusus di lingkungan Pemerintah DIY. Selain itu dengan adanya Kajian PDRB hijau diharapkan konsep ekonomi hijau akan menjadi rujukan dalam proses pembangunan daerah di DIY.

Selain itu implementasi ekonomi hijau juga dilakukan dengan adanya wacana pembangunan desa hijau (green village) yang merupakan desa yang memiliki kualitas atau lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tanpa adanya desa hijau, maka agenda desa membangun akan gagal. Pencemaran lingkungan, eksploitasi berlebih atas sumber daya alam (SDA) dan degradasi lingkungan terus berlangsung semakin parah. Kerusakan lingkungan tersebut akan berakibat pada meningkatnya kerentanan ekonomi, kesehatan, dan konflik sosial. Desa hijau akan membuat sumber daya alam menjadi lestari dan dipakai secara arif dan bijaksana untuk kesejahteraan warganya secara adil dan merata.

Desa Hijau merupakan sebuah wacana pendekatan ekonomi hijau. Ekonomi hijau sendiri merupakan suatu gagasan isu keberlanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus mencegah meningkatnya emisi gas rumah kaca dan mengatasi dampak perubahan iklim. Melalui pendekatan ekonomi hijau, pemerintah akan dapat memetakan sektor mana yang pantas mendapatkan stimulus sehingga stimulus tidak diberikan pada sektor yang rentan atau bahkan merusak. Pemetaan tersebut juga dapat digunakan untuk melihat sektor mana yang dapat bertahan dalam segala kondisi termasuk pandemi.

Oleh sebab itu, disusunlah Kajian Desa Mandiri Hijau dengan tujuan konsep desa yang mampu mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan desa dengan tetap mempertahankan tradisi, kearifan, dan pengetahuan lokal. Selain itu desa diharapkan mampu mengembangkan produk ekonomi desa berbasis sumber daya alam dan dikelola secara berkelanjutan, yang membuka jalan bagi kesejahteraan masyarakat desa dan kawasan perdesaan. Dengan adanya Kajian Desa Mandiri Hijau diharapkan nantinya desa dapat masuk dalam perhitungan pencapaian dan perhitungan ekonomi hijau dengan konsep desa mandiri hijau. Selain itu diharapkan adanya pengembangan ekonomi yang berbasis pada desa seperti pertanian berkelanjutan, bisnis beretika dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab.

Selain ekonomi hijau, penghitungan sumber daya alam dan lingkungan semakin mendapatkan perhatian dari berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun demikian pemahaman mengenai konsep dan metode penghitungannya masih bervariasi, terutama apabila penghitungan tersebut mencakup penilaian dalam arti uang. Penyusunan neraca adalah amanah UUD No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan juga UU No 27 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Neraca Sumber Daya Alam diartikan sebagai alat untuk mengetahui besarnya sisa cadangan yang dinyatakan dalam saldo dalam suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Neraca Sumber Daya Alam merupakan perimbangan (*balance*) antara kondisi sumber daya alam semula (kondisi awal) dengan kondisi berikutnya (kondisi akhir).

Disusunnya Kajian Neraca Sumber Daya Alam dimaksudkan untuk menyajikan nilai moneter sumber daya alam (SDA) baik yang diambil dari dalam tanah (mineral), yang berada di atas tanah (hutan), maupun yang berada di perairan (sumber daya air dan sumber daya perikanan), beserta degradasi lingkungan yang ditimbulkannya. Dengan disusunnya Kajian Neraca SDA diperoleh gambaran arus barang asal sumber daya alam ke dalam penggunaan ekonomi, merekam perubahan yang terjadi selama periode perhitungan, serta degradasi lingkungan yang ditimbulkannya.

Berdasarkan kajian tersebut, berkaitan dengan sumber daya air, perlu adanya upaya-upaya untuk dapat menahan air semakin lama di darat untuk bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kemudian terkait dengan sumber daya lahan, perlu adanya penegakan peraturan terkait alih fungsi lahan pertanian dengan mengacu ke rencana tata ruang. Selain itu perlu pengembangan teknologi pertanian agar meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Sumber daya hutan perlu terus dipertahankan dan ditingkatan produk hasil hutan dan ikutannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan sumber daya perikanan, perlu ditingkatkan produksi khususnya pada perikanan budidaya, ikan hias dan tambak garam.

Berkaitan dengan sumber daya alam, Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri memiliki pola model pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif dan berjangka pendek. Bahkan kurangnya memperhatikan upaya mempertahan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan. Untuk menjangkau suatu lompatan besar, Daerah Istimewa Yogyakarta harus meninggalkan praktik-praktik

ekonomi yang mementingkan pertumbuhan ekonomi semata yang berujung pada berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani, termasuk diantaranya menggerakan perekonomian dan potensi yang rendah di berbagai wilayah. Dalam hal itu perlu adanya perhitungan valuasi jasa lingkungan yang bertujuan untuk memajukan keterkaitan antara konservasi sumber daya alam dan pembangunan ekonomi. Valuasi ekonomi jasa lingkungan dapat digunakan sebagai alat meningkatkan apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

Penyusunan Kajian Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Pendukung Ekonomi hijau merupakan kajian lanjutan dari Kajian Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Utama yang sudah disusun di tahun sebelumnya. Kajian Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Pendukung Ekonomi Hijau dilakukan dengan maksud untuk optimalisasi pemulihan ekonomi yang komprehensif dan terakselerasi serta menjamin keberlangsungan pembangunan dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat di DIY.

Dengan disusunnya Kajian Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Pendukung Ekonomi Hijau diharapkan adanya arah kebijakan berbagai sektor pendukung (pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, serta konstruksi) yang mengimplementasikan pertumbuhan ekonomi hijau dimulai dari lingkungan sekolah, adanya pengolahan limbah rumah sakit yang tidak mencemari air tanah dan sungai, tidak menggunakan lahan hijau yang produktif untuk pemukiman, dan diterapkannya konsep pembangunan Environmental, Social dan Governance (ESG). Arah kebijakan pembangunan sektor strategis DIY diharapkan mampu menekankan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhitungankan dampaknya terhadap perubahan kualitas lingkungan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi hijau.

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan strategis Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan usaha garam rakyat di Pantai Sepanjang, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, telah dikeluarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY Nomor 530/18781 tanggal 20 November 2020 yang ditujukan kepada beberapa OPD teknis terkait Roadmap Pengembangan Usaha Garam Rakyat di DIY dengan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY sebagai Koordinator.

Telah dilakukan pelatihan dan pendampingan mulai dari pembangunan rumah produksi garam hingga pelatihan produksi garam yang

sesuai dengan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Oleh karena itu telah dilakukan koordinasi dengan berbagai OPD mitra dan juga Balai Besar Pom (BBPOM) di DIY secara rutin. Selain itu, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY juga melakukan pemantauan langsung terkait pembangunan rumah produksi serta proses produksi garam oleh Kelompok Usaha Garam 'Tirta Bahari' di Pantai Sepanjang, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.

Gambar 3.4 Pemantauan Produksi Garam di KUGAR TIRTA BAHARI

Gambar 3.5 Pemantauan Pembangunan Rumah Produksi Garam di KUGAR TIRTA BAHARI

Koordinasi lintas sektor yang rutin dilaksanakan antara Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY selaku koordinator dengan OPD-OPD teknis pelaksana, target garam konsumsi ber SNI telah tercapai pada Desember 2022. Diharapkan dengan terbitnya SNI untuk garam produksi Tirta Bahari, maka garam produksi lokal tersebut dapat dipasarkan secara legal dan lebih luas sehingga mendukung adanya peningkatan perekonomian masyarakat pesisir di Kawasan Pantai Sepanjang.

Gambar 3.6 Sertifikat SNI untuk Garam Konsumsi dari Tirta Bahari

CERTIFICATE

SUCOFINDO

Certificate No. PCS 01239.01

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Menganugerahkan kepada Pabrik
Hereby grants to Factory

KOPERASI PRODUSEN GARAM TIRTA BAHARI
Pantai Sepanjang, Nglaos, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul, Kel. Kemadang, Kec. Tanjungsari, Kab. Gunungkidul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dan

PRODUK : GARAM KONSUMSI BERYODIUM
TIPE / MODEL : Lihat Lampiran
SPESIFIKASI : Lihat Lampiran
MEREK : SBS SEGARA BUMI SEPANJANG
PERUSAHAAN : KOPERASI PRODUSEN GARAM TIRTA BAHARI
Pantai Sepanjang Nglaos, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul, Kel. Kemadang Kec. Tanjungsari, Kab. Gunungkidul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
PENANGGUNG JAWAB : WAHYONO
Telah memenuhi standar : SNI 01-3556-2000
Garam Konsumsi Beryodium

Sertifikat ini berdasarkan skema yang terdiri dari: Audit Pabrik, Pengujian Dan Pengawasan Berkala (Tipe 5)

KAN

Budi Utomo
Vice President

This certificate is valid from December 29th, 2022 until December 28th, 2026

Issued date: December 29th, 2022

Faktor Pendukung keberhasilan

a. Kerjasama yang baik dari stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan program kegiatan lintas sektor dalam rangka penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam
b. Komitmen dari para stakeholder terkait pembangunan dan pengembangan perekonomian di DIY
c. Melaksanakan monitoring evaluasi program dan kegiatan secara berkala baik memalui rapat-rapat rutin bulanan secara offline (tatap muka) ataupun online (zoom meeting dan atau dengan media komunikasi lain)

3.2. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	100	100	100%	2.830.446.750	2.689.676.075	95,03	Rp. 140.470.675 (5%)
Jumlah						**2.830.446.750**	**2.689.676.075**	**95,03**	
Total Belanja Langsung						**2.830.446.750**	**2.689.676.075**	**95,03**	

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA memenuhi target kinerja tahun 2022 dengan realisasi

anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 2.830.446.750,- terealisasi Rp. 2.689.676.075,- atau 95,03% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp. 140.470.675,- atau 5% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honorarium

3.3. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain :

a. Perluasan Cakupan Implementasi Kebijakan Penyerapan Pangan Lokal (Beras ASN) Upaya untuk menyerap produk langsung dari gapoktan untuk menjamin serapan produsen dan meningkatkan kesejahteraan produsen.
b. Strategi Kebijakan Kreasibatik (kolaborasi, sinergi dan inovasi pengembangan potensi lokal) Strategi kebijakan Kreasibatik merupakan implementasi dari kolaborasi, sinergi dan inovasi pengembangan potensi lokal yang dilaksanakan pada beberapa kalurahan terpilih sebagai pilot project (model) sebagai upaya untuk percepatan pemulihan ekonomi inklusif di DIY
c. Kerjasama antara Pemda DIY dengan Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta. Menjalin Kerja sama dengan instansi non Pemda dalam hal ini bersama Bulog DIY melalui Kesepakatan Bersama terkait Pengelolaan Pangan Yang Terintegrasi Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 04/12000/09/2022 --- 119/02852/2022. Hal ini untuk mendukung Kerjasama dalam pengelolaan potensi pangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kerja sama dalam kegiatan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok. Kerja sama tersebut nantinya akan mendukung upaya pengendalian inflasi daerah di DIY
d. SE Gubernur DIY tentang Pengendalian Inflasi Daerah nomor 500/16964. Menerbitkan Surat Edaran Gubernur DIY tentang Pengendalian Inflasi Daerah nomor 500/16964 sebagai upaya pengendalian inflasi, seperti Optimalisasi

TPID, Gerakan Penghematan Energi, Gerakan Tanam Pangan Cepaat Panen, Mempercepat Kerja Sama Antardaerah.

e. Instruksi Gubernur DIY tentang Kolaborasi dan Sinergi Pentahelix Dalam Optimalisasi Pengembangan Pot. Menerbitkan instruksi kepada BupatiMalikota, OPD lingkup Pemda DIY, lembaga swasta/ perbankan, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, asosiasil industri, Kalurahan/masyarakat dan media untuk mengoptimalkan kerjasama serta ikut berkontribusi dan terlibat secara aktif dalam percepatan pemulihan ekonomi inklusif dengan mengoptimalkan pengembangan potensi lokal dalam rangka mendorong kolaborasi dan sinergi pentahelix linlas sektor dalam optimalisasi pengembangan potensi lokal sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi inklusif di DIY

f. Website KURJogja. Upaya untuk meningkatkan akses keuangan di daerah melalui digitalisasi layanan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat DIY. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan

g. Sertifikat SNI Garam Konsumsi Beryodium. Pendukung pengembangan usaha garam di pesisir DIY dalam hal penguatan produk dan pengembangan pasar

h. JAKSA BANIKARTA (Kebijakan Akses Bagi Petani dengan Kartu Tani) Melalui Ikatan Kerjasama. JAKSA BANIKARTA (Kebijakan akses bagi petani dengan kartu tani) melalui ikatan kerjasama dikembangkan karena petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani dan akses pasar di daerah pertanian khususnya pada masyarakat petani yang tinggal di Pedesaan Program ini merupakan Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan petani, antara lain kebijakan kemudahan akses penyediaan saprodi khususnya pupuk bersubsidi

i. Penyusunan Instrumen/Kriteria Penilaian dan Monev Desa/Kalurahan Mandiri Budaya melalui Sistem Self. Upaya mengakomodir sistem usulan bottom up dari Desa/kalurahan yang akan ditetapkan menajdi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya

j. Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Instrumen monitoring dan evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya

berfungsi sebagai panduan bagi Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dalam menentukan sejauh mana hasil dan dampak penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya untuk selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan kelanjutan program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di masing-masing desa/kalurahan

k. Katalog Kajian Biro. Katalog ini mengumpulkan kajian-kajian yang pernah dibuat oleh Biro APSDA dari tahun 2015-sekarang, bertujuan agar seluruh karyawan atau masyarakat umum bisa mengakses (tetap dengan ijin akses dan tidak bisa di download)

l. Penyusun aplikasi sistem akuntansi pendamping berbasis Microsoft Excel untuk mencetak Laporan Keuangan. Menyusun aplikasi untuk membantu mencetak laporan keuangan dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel, input dilakukan dengan menggunakan data spj fungsional dan input jurnal memorial, output yg dihasilkan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

m. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.

n. Pemanfaatan zoom meeting dalam pelaksanaan rapat

3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yograkarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimea Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimwa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk

pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak *pandemic* COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III.7

Inventarisasi Lintas Sektor Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY 3. Perguruan Tinggi 4. Bappeda 5. Seluruh instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi	1. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY : a. Biro APSDA sebagai koordinator dalam pelaksanaan penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi DIY Tahun 2022-2024 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY : Sebagai instansi yang memberikan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2024, baik untuk penyelenggaraan acara di Hotel, penyediaan souvenir dan honorarium narasumber.	- Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah DIY Tahun2022 - 2024	Masyarakat DIY (Produsen, Distributor, Pedagang, Konsumen)	Bagi Pemerintah Daerah: 1. Mendukung upaya stabilisasi inflasi di daerah 2. Mendukung pencapaian kinerja program kerja pengendalian inflasi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) pada masing-masing instansi TPID DIY 3. Menyelaraskan kesinambungan upaya pengendalian inflasi daerah dengan perencanaan strategis daerah

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		Daerah (TPID) DIY	3. Perguruan Tinggi : Sebagai tenaga ahli yang memberikan masukan untuk perbaikan program kerja 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) yang dituangkan pada Peraturan Gubernur tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2024 4. Bappeda a. Arah kebijakan pengendalian inflasi daerah b. Keterpaduan dan keselarasan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2024 dengan dokumen perencanaan di DIY seperti RPJMD dan RKPD 5. Seluruh instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY			4. Mendukung pencapaian kinerja Daerah terkait pengendalian inflasi daerah yang selalu dievaluasi oleh Pemerintah Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Bagi Kelompok Sasaran: 1. Memberikan arah program kerja sesuai target yang ditetepkan pada tiap periode

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			a. Keterpaduan dan Keselarasan Program Kerja dengan Perencanaan dan Penganggaran masing-masing instansi b. Memberikan masukan antar Instansi terkait penyusunan program kerja 4K yang tertuang pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2024			
2	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1. Biro APSDA 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY 3. Seluruh instansi yang tergabung dalam Tim Pengend	1. Biro APSDA sebagai koordinator dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Tahunan TPID. Biro APSDA berperan dalam mgnkompilasi dan menyusun Laporan Kinerja sesuai format yang telah ditetapkan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY : Sebagai instansi yang memberikan fasilitasi tambahan pada pelaksanaan kegiatan Konsinyering	- Surat Edaran Nomor Tentang Pengendalian Inflasi Daerah - Laporan Kinerja Tahunan TPID - Kesepakatan Bersama Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta dengan Biro Perekonomian Tentang Pengelolaan Pangan yang Terintegrasi di Wilayah DIY	Masyarakat DIY (Produsen, Distributor, Pedagang, Konsumen)	1. OPD : a. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran RPJMD b. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan c.. Mendukung pencapaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan d. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		alian Inflasi Daerah (TPID) DIY 4. TPID Kabupaten/Kota 5. Perguruan Tinggi	Penyusunan Laporan Kinerja TPID DIY untuk mengumpulkan anggota TPID DIY. Bersama Biro APSDA, KPw Bank Indonesia DIY mengkompilasi data, informasi, bukti dokumen dari seluruh anggota TPID DIY untuk kemudian disusun dalam bentuk Laporan Kinerja TPID sesuai format yang telah ditetapkan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 3. Seluruh instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY : Saling memberikan masukan, data, informasi, bukti dokumen, usulan program yang dituangkan pada Laporan Kinerja Tahunan TPID. 4. TPID Kabupaten/Kota : Saling melengkapi kebutuhan data, informasi, bukti dokumen dalam penyusunan Laporan Kinerja TPID 5. Perguruan Tinggi : sebagai			e. Mendukung pencapaian kinerja sasaran f. Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			tenaga ahli yang memberikan masukan, usulan inovatif program kerja yang akan diunggulkan pada proses penyusunan dan penulisan Laporan Kinerja Tahunan TPID DIY			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
3.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1. Biro Administrasi 2. OPD Lingkup Pemda DIY dan Pemda Kabupaten/Kota 3. Lembaga Jasa Keuangan/Perbankan (Bank Indonesia, OJK, BNI, Mandiri, BRI dan BPD DIY) 4. BUMD di Lingkup Pemda DIY	1. Biro Administrasi berperan melakukan koordinasi dan sinkronisasi implementasi kebijakan kreasibatik dengan semua stakeholders lintas sektor melalui rapat koordinasi dan rapat kerja serta koordinasi kunjungan ke lokus kalurahan 2. OPD Lingkup Pemda DIY dan Pemda Kabupaten/Kota - Mengintensilkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) pentahelix untuk menjaga momentum pertumbuhan dan pemulihan ekonomi DIY yang sedang berlangsung agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui optimalisasi pengembangan potensi lokal. - Mengoptimalkan keterlibatan para pemangku kepentingan lintas sektor pentahelix yang telah diwujudkan melalui keda	Instruksi Gubernur DIY Nomor 27/INST/2022 tentang Kolaborasi dan Sinergi Pentahelix, dalam Optimalisasi Pengembangan Potensi Lokal sebagai upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta.batik	OPD Terkait dan Masyarakat	1. OPD : a. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran RPJMD b. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan c.. Mendukung pencapaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan d. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA e. Mendukung pencapaian kinerja sasaran f. Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA 2. Mengembangkan potensi lokal

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		5. Perguruan Tinggi dan Asosiasi/Organisasi/Industri 6. Pemerintah Kalurahan	sama dengan Pemerintah Daerah DIY sebagai upaya mendorong pemberdayaan ekonomi dan potensi tokal baik di dalam negeri, perdagangan antar daerah maupun intra daerah 3. Lembaga Jasa Keuangan/Perbankan (Bank Indonesia, OJK, BNI, Mandiri, BRI dan BPD DIY) - Berperan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada pelaku usaha serta mendorong perluasan pemanfaatan pasar digital dalam transaksi perdagangan untuk mendukung pengembangan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. BUMD di Lingkup Pemda DIY Perguruan Tinggi dan Asosiasi/Organisasi/Industri - Berperan dalam pengembangan inkubasi bisnis,			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			penguatan inovasi, pemberdayaan/ peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku ekonomi lokal, dan membangun jejaring pemasaran dan teknologi di tingkat Kalurahan 5. Pemerintah Kalurahan - Berperan mendorong pengembangan produk unggulan di kawasan Kalurahan atau pedesaan baik berupa pengembangan komoditas maupun wisata berbasis alam dan budaya.			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
4	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1. OPD lingkup Pemda DIY, OPD Kab/Kota, GIPI dan Bank Indonesia 2. Perguruan Tinggi/Akademisi 3. Kementerian Pariwisata dan Ekraf	1. OPD lingkup Pemda DIY, OPD Kab/Kota, GIPI dan Bank Indonesia memberikan masukan berupa data/informasi pelaksanaan implementasi kebijakan pariwisata dan ekraf , serta masukan dalam penyusunan bahan rekomendasi kebijakan 2. Perguruan Tinggi/Akademisi memberikan masukan berupa telaah/kajian dan analiasi terhadap implementasi kebijakan pariwisata dan ekraf , serta masukan dalam penyusunan bahan rekomendasi kebijakan 3. Kementerian Pariwisata dan Ekraf berperan dalam memberikan masukan serta merumuskan kebijakan di level nasional yang akan menjadi acuan daerah dalam hal ini Biro Administrasi Perekonomian dan SDA dalam melaksanakan kebijakan pariwisata dan ekraf	- Nota Dinas Koordinasi Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) DIY - Bahan Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Dampak Pasca Pandemi Covid-19 Terhadap Roadmap baru Pemberdayaan UKM di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Rekomendasi Kebijakan Terkait Hasil Kajian Review Kebijakan Strategis Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan DIY Tahun 2019-2025	OPD Terkait dan Masyarakat	1. OPD : a. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran RPJMD b. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan c.. Mendukung pencapaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan d. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA e. Mendukung pencapaian kinerja sasaran f. Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA 3. Menggerakkan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
5.	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD : Pelaksanaan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	OPD : 1. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY 2. Dinas Koperasi dan UKM DIY 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 4. Dinas Pariwisata DIY 5. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 6. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 7. Dinas Komunikasi dan Informatika	OPD : 1. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY berkontribusi dalam a. Menyusun kebijakan TPAKD b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TPAKD c. Penyusunan dan penyampaian Laporan Monev TPAKD 2. Dinas Kopersi dan UKM DIY berkontribusi dalam a. Pendampingan usaha UMKM b. Penyediaan data UMKM 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY berkontribusi dalam a. Pendampingan pembiayaan bagi UMKM b. Penyediaan data dan pendampingan usaha UMKM 4. Dinas Pariwisata DIY berkontribusi dalam penyediaan data 5. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	1. Pergub DIY Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY 2. Laporan Pelaksanaan Program Kerja TPAKD DIY 3. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Literasi Keuangan dan Kewirausahaan yang dilaksanakan serentak di 12 SMA/SMK se-DIY 4. Laporan Pelaksanaan Webinar Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Optimalisasi Peran TPAKD yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI 5. Laporan Pelaksanaan	OPD Terkait dan Masyarakat/ Pelajar	1. OPD : a. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran RPJMD b. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan c. Mendukung pencapaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan d. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA e. Mendukung pencapaian kinerja sasaran f. Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA 2. Masyarakat (pelaku usaha dan pelajar) : a. Menambah modal usaha b. Meningkatkan skil pelaku usaha c. Meningkatkan kualitas produk d. Memperluas jaringan pemasaran

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		DIY 8. Dirjen Perbendaharaan DIY 9. Bank Indonesia - Yogyakarta 10. OJK DIY	berkontribusi dalam penyediaan data dan pendampingan usaha UMKM 6. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY berkontribusi dalam penyediaan data dan sosialisasi SimPel 7. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY berkontribusi dalam penyesuaian speksifikasi website KUR Jogja 8.Dunia usaha : Asosiasi UMKM berkontribusi dalam memperluas wawasan dan informasi pasar 9. PT Lembaga Jasa Keuangan Penyalur KUR berkontribusi dalam pelaksana teknis dan penyedia data	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kredit Usaha Rakyat DIY Tahun 2022 6. Penghargaan Finalis Wilayah Implementasi KEJAR Terbaik Tingkat Provinsi		e. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
6.	Koordinasi dan evaluasi Penyelenggaraan Desa Mandiri Budaya	● Biro APSDA, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Koperasi & UKM, Dinas P3AP2 DIY, Biro Tata Pemerintahan, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Paniradya Kaistimewaan	● Biro APSDA menyusun kebijakan berupa Surat Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 30/SEKDA/VI/2022 tentang Penetapan Kriteria Penilaian Sebagai Dasar Pemberian Peringkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, Keputusan Gubernur DIY Nomor: 234/KEP/2022, Tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022, Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor: 44/SEKDA/VIII/2022, Tentang Instrumen Monitoring dan Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Dalam penyusunan kebijakan ini dengan melibatkan beberapa OPD seperti Paniradya Kaistimewan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, DP3AP2, dll	Rekomendasi kebijakan dan evaluasi penyelenggaraan desa/kalurahan mandiri budaya	OPD dan masyarakat	Manfaat bagi OPD ● Mendukung pencapaian salah satu target kinerja Program Pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Perda nomor 3 Tahun 2018 tentang RPJMD DIY Tahun 2017-2022 yang menjadi tanggung jawab Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan yaitu indikator kinerja jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kelurahan Budaya, Desa/ Kampung Wisata, Desa Preneur dan Desa Prima) dengan target 20 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya pada tahun 2019-2022 ● Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			● Biro APSDA juga menyusun kajian kebijakan dan evaluasi penyelenggaraan desa/kalurahan mandiri budaya untuk menyusunan rekomendasi kebijakan penyelengaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di DIY ● Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, DP3AP2 dan Dinas Koperasi dan UKM: a) Pendampingan kepada Desa Mandiri Budaya oleh OPD pengampu sesuai tugas dan fungsinya b) Pemberian pelatihan untuk peningkatan kualitas dan kemampuan SDM pengelola Desa Mandiri Budaya oleh OPD pengampu sesuai tugas dan fungsinya c) Pemberian bantuan sapras di desa mandiri budaya bail melalui Bantuan Gubernur, APBD dan APBN melalui OPD terkait			● Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA Manfaat bagi masyarakat : ● Mengurangi kemiskinan ● Mengatasi pengangguran ● Meningkatkan pemberdayaan masyarakat ● Meningkatkan investasi

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
7.	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan DIY	● Biro APSDA, Dinas PUP ESDM DIY, Dinas PTR DIY, DPPM DIY, DPKP DIY, DKP DIY, DLHK DIY, Bappeda DIY, Biro PIWP2	● Biro APSDA: koordinasi baik secara internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan termasuk pelaksanaan Program Strategis Nasional di DIY, inventarisasi permasalahan dan hambatan serta menyampaikan rekomendasi penyelesaian permasalahan yang timbul dari pelaksanaan program prioritas, pemantauan terhadap strategi dan kebijakan percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ● OPD yang terlibat: Koordinasi dan sinkronisasi OPD yang terlibat secara kontinu	Rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan evaluasi pelaksanaan n percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan DIY	OPD	Manfaat bagi OPD: ● Mendukung pencapaian kinerja Sasaran RPJMD ● Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA ● Mendukung pencapaian kinerja sasaran perumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan percepatan pelaksanaan program prioritas ● Mendorong percepatan pelaksanaan program-program prioritas yang telah ditetapkan Gubernur DIY ● Mendorong perkembangan pembangunan infrastruktur di DIY

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
8.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam (Pemantauan dan Evaluasi Roadmap Usaha Garam DIY)	1. Bappeda DIY 2. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 4. Dinas Koperasi dan UKM DIY 5. Dinas Perijinan dan Penanaman Modal DIY 6. Dinas Pertanahan dan Tat Ruang 7. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY 8. Balai Besar	1. Biro APSDA sebagai penyusun Roadmap Usaha Garam dan bertugas melakukan koordinasi serta melakukan sinkronisasi antara perangkat daerah terkait 2. Bappeda DIY memberikan kebijakan teknokratis 3. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai focal point dalam pengembangan usaha gram DIY 4. Dinas Perindutrian dan Perdagangan DIY melakukan persiapan dan pendampingan pelaksanaan pembuatan rumah produksi garam sebagai pendukung utama produksi garam ber-SNI 5. Dinas Koperasi dan UKM DIY melakukan pendampingan terhadap kelompok usaha garam sehingga terbentuk menjadi badan hukum 6. Dinas Perijinan dan Penanaman Modal DIY melakukan pendampingan pembuatan ijin edar, merk dagang, dan pembuatan SNI 7. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1. Sertifikasi SNI Garam Konsumsi, sebagai capaian roadmap usaha garam tahun 2020-2022 2. Rumah produksi garam Tirta Bahari di Pantai Sepanjang, Kemadang, GK 3. Badan hukum kelompok petani garam Tirta Bahari	1. Kelompok Usaha Garam 2. Perangkat Daerah yang tercantum di dalam Roadmap Usaha Garam	Kelompok Usaha Garam : 1. Peningkatan pendapatan anggota kelompok 2. Mata pencaharian alternatif Perangkat daerah : 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran RPJMD Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		Pengawas Obat dan Makanan DIY 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	memberikan rekomendasi lokasi yang dapat dipergunakan sebagai lokasi tunnel garam dan rumah produksi garam 8. BBPOM melakukan pendampingan dalam proses pencapaian SNI 9. BBPO bersama dengan Disperindag DIY menyusun layout rumah produksi garam 10. KKP RI memberikan support pengembangan usaha garam dengan memberikan proyek percontohan usaha garam			SDA
		Fakultas Geografi UGM	Memberikan bantuan penelitian ilmiah mengenai kondisi fisik pesisir selatan dalam mendukung pengembangan porduksi garam DIY	Jurnal Ilmiah "Land Evaluation for Salt Ponds Development in the Coastal Area of Yogyakarta Province" (Indonesian Journal of Science & Technology)		

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		Masyarakat	1. Masyarakat desa Kemadang 2. Masyarakat desa Kanigoro	Kelompok Usaha Garam Tirta Bahari Kelompok Usaha Garam Dadap Makmur		

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

Hasil laporan kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi. Oleh karena itu, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melakukan analisis terhadap isu-isu strategis agar dapat menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera.
2. Didalam pelaksanaan analisis untuk membuat rumusan kebijakan agar dapat menghasilkan kebijakan perlu diwaspadai faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan karena belum memadainya kemampuan dan profesionalisme SDM/aparat untuk mengatasi perubahan sosial budaya masyarakat yang tidak terkendali, pasar global/pasar bebas, perubahan iklim dan global warming. Meskipun demikian, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.
3. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan untuk ke depannya.
4. Penyerapan atas belanja langsung sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD adalah sebesar 95,03 % dan capaian fisik sebesar 100% serta menghasilkan capaian kinerja OPD sebesar 100% yang diperoleh dari ditindaklanjutinya seluruh bahan kebijakan yang disusun oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk menjadi kebijakan pada tahun berikutnya.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memerlukan adanya masukan berupa Faktor Lingkungan Internal dan faktor Lingkungan Eksternal. Faktor-faktor ini bersifat obyektif, oleh sebab itu penentuannya harus didasarkan analisis yang tidak memihak dan atas dasar kesepakatan bersama dari anggota kelompok analisis
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
4. Memanfaatkan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tabel 4- 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase rumusan Kebijakan menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	80	85	90	95	100

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦲꦤꦺꦩꦸꦲꦤꦺꦴꦤꦺꦴꦩꦶꦤ꧀ꦩꦶꦤꦺꦴꦩꦶꦤ꧀

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 555460

Website : biroperekonomian.jogjaprov.go.id Email : biro.perekonomian@jogjaprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka tindak lanjut penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNA PANCAWATI, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
GUBERNUR	KEPALA BIRO ADMINISTRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA DIY,
HAMENGKU BUWONO X	YUNA PANCAWATI, S.E., M.Si.
	NIP. 196606041993032007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Perangkat Daerah : **Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY**
Jabatan : **Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	%	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan	Program Perekonomian dan Pembangunan (APBD)	Rp. 2.279.746.000
2.	Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian		

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
3.	Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah		
4.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 387.042.000
5.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp. 2.666.788.000

2. *) Data capaian tersedia pada triwulan IV.
3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya Rp. 163.658.750

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
DAN SDA SETDA DIY,

YUNA PANCAWATI, S.E., M.Si.
NIP. 196606041993032007

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya

R

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
ꦲꦤꦺꦱꦥꦼꦏ꦳ꦠꦺꦴꦫꦠ꦳

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Sleman
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567
E-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 15-03-2022

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
di –
Yogyakarta

Nomor : 700/01103
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
   b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
   a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
      1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
      2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;

b. Aspek...

Dipindai dengan CamScanner

d. Evaluasi Internal meliputi:
   1) Pemenuhan Evaluasi;
   2) Kualitas Evaluasi;
   3) Pemanfaatan Evaluasi.
e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
   1) Kinerja Yang di Laporkan *(Output)*;
   2) Kinerja Yang di Laporkan (*Outcome*);
   3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
   4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY memperoleh nilai sebesar 82,35 kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dengan rincian sebagai berikut:
   a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,27 atau 90,89% dari bobot sebesar 30%;
   b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,60 atau 90,42% dari bobot sebesar 25%;
   c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,02 atau 73,44% dari bobot sebesar 15%;
   d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 7,92 atau 79,17% dari bobot sebesar 10%;
   e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 13,54 atau 67,71% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 yang lalu, telah dilakukan tindak lanjut berupa review terhadap dokumen rencana strategis SKPD agar selaras dengan dokumen RPJMD dan melakukan monitoring secara berkala tentang evaluasi kinerja secara menyeluruh, Karena renstra 2017-2022 perubahan terakhir disusun tahun 2020.

Dipindai dengan CamScanner

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY beserta seluruh jajarannya agar:
   a. Melakukan evaluasi atas program dan kegiatan OPD terkait output dan outcome yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan;
   b. Terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga seluruh target baik output maupun outcome yang ditetapkan dapat tercapai dan bisa mendapatkan penilaian yang baik atas kinerja dari stakeholder.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2021, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PLH INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

SUMADI, S.H.,M.H
NIP 19630826 198903 1 007

Tembusan :
Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY

Dipindai dengan CamScanner

4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJIP Tahun Sebelumnya

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213Telepon (0274) 562811 Faximili (0274) 555460
Website:biroperekonomian.jogjaprov.go.id Email: biro.perekonomian@jogjaprov.go.id

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKj IP TAHUN SEBELUMNYA
Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah DIY

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Surat Inspektur DIY Nomor: 700/01103 tanggal 15 Maret 2022, perihal Laporan Hasil evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY. Rekomendasi: a. Melakukan evaluasi atas program dan kegiatan OPD terkait output dan outcome yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan; b. Terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga seluruh target baik output maupun outcome yang ditetapkan dapat tercapai dan bisa mendapatkan penilaian yang baik atas kinerja dari stakeholder	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan ditingkat internal Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY atas program dan kegiatan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, termasuk dalam hal evaluasi kinerja secara menyeluruh, diharapkan ke depan hasil atas implementasi SAKIP di Biro dapat lebih meningkat.

Kepala
Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA

YUNA PANCAWATI, S.E., M.Si.
NIP. 196606041993032007